

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada lampiran E tentang Akuntansi dan Pelaporan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/ atau barang pada satuan kerja.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Berdasarkan laporan ini, realisasi **Pendapatan dan Hibah** untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp.245.817.000,00** dari target Pendapatan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA TA 2018 sebesar **Rp.481.000.000,00** . atau **51,11 %** Sementara itu, realisasi **Belanja Tidak Langsung** berupa Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS adalah sebesar **Rp.13.748.270.861,00** atau **92,59 %** dari pagu Belanja yang dianggarkan sebesar **Rp.14.848.663.895,00** sedangkan realisasi **Belanja Langsung** adalah sebesar **Rp.13.386.661.541,00** atau **95,32 %** dari pagu Belanja yang dianggarkan dalam DPA TA 2018 sebesar **Rp.14.043.408.200,00**.

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2018. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar **Rp.25.738.813.788,38** dan Kewajiban sebesar **Rp.45.288.711,00** sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp.25.693.525.077,38**.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Kami menyadari bahwa laporan keuangan tahunan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jambi, Januari 2019

KEPALA DINAS,

Drs. UJANG HARIADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19630202 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1	
DAFTAR ISI	3	
DAFTAR TABEL	5	
DAFTAR GRAFIK	6	
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	7	
RINGKASAN	8	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	12	
NERACA	13	
LAPORAN OPERASIONAL (LO)	14	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	15	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	16	
BAB I	Pendahuluan	16
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	16
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	17
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	18
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD.	20
	2.1. Ekonomi Makro	20
	2.2. Kebijakan Keuangan	20
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	21
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD	23
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	23
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	25
BAB IV	Kebijakan Akuntansi	26
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	26
	4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	26
	4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD	27
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD	27

BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	35
	5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD	35
	5.1.1. Laporan Realisasi Anggaran	35
	5.1.2. Neraca	38
	5.1.3. Laporan Operasional	39
	5.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas	40
	5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis akrual, untuk entitas akuntansi /entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD	41
	5.2.1. Aset Lancar	41
	5.2.2. Aset Tetap	42
BAB VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD	48
BAB VII	Penutup	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	9
Tabel 2	Perbandingan Neraca 31 Des 2018 dan 31 Des 2017	11
Tabel 3	Perbandingan Belanja Per 31 Des 2018 dan 31 Des 2017	23
Tabel 4	Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2018	35
Tabel 5	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018	36
Tabel 6	Rincian Belanja per Sumber Dana TA 2018 dan 2017	37
Tabel 7	Pengembalian Belanja (SSP) Tahun Anggaran 2018 per Jenis Belanja	37 38
Tabel 8	Perbandingan Neraca 31 Des 2018 dan 31 Des 2017	39
Tabel 9	Perbandingan Laporan Operasional (LO) 31 Des 2018 dan 31 Des 2017	40
Tabel 10	Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 31 Des 2018 dan 31 Des 2017	41
Tabel 11	Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	42
Tabel 12	Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	42
Tabel 13	Perbandingan Aset Tetap per 31 Des 2018 dan 31 Des 2017	43
Tabel 14	Perbandingan Aset pada Neraca dan Aset Tetap dalam Buku Inventarisasi Aset per 31 Desember 2018	44
Tabel 15	Peralatan dan Mesin	44
Tabel 16	Gedung dan Bangunan	45
Tabel 17	Jalan, Jaringan dan Instalasi	45
Tabel 18	Aset Tetap Lainnya	46
Tabel 19	Konstruksi Dalam Pengerjaan	46
Tabel 20	Akumulasi Penyusutan	46
Tabel 21	Sumber Daya Disbudpar Provinsi Jambi	56
Tabel 22	Jumlah PNS di Lingkungan Disbudpar (Berdasarkan Pangkat dan Jenis Kelamin)	57
Tabel 23	Jumlah PNS di Lingkungan Disbudpar (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)	57
Tabel 24	Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Perkembangan Usaha Pariwisata	58
Tabel 25	Data Kunjungan Ke Museum dan Jumlah Koleksi	60
Tabel 26	Data Kelompok Kesenian di Provinsi Jambi	61
Tabel 27	Analisa SWOT dalam Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	62

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan LRA TA 2018 dan 31 Des 2017	10
Grafik 2	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018	36
Grafik 3	Komposisi Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2018	38
Grafik 4	Grafik Komposisi Neraca	39
Grafik 5	Komposisi Aset Tetap per 31 Des 2018 dan 31 Des 2017	43
Grafik 6	Tingkat Pertumbuhan Hotel Bintang dan Hotel Melati di Provinsi Jambi Tahun 2011 - 2015	59
Grafik 7	Tingkat Pertumbuhan Restoran dan Rumah Makan di Provinsi Tahun 2011 - 2015	59
Grafik 8	Tingkat Pertumbuhan Biro Perjalanan Wisata di Provinsi Jambi Tahun 2011 - 2015	60

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI**

Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (LO), (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah direview oleh Inspektorat Provinsi Jambi dan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Januari 2019

KEPALA DINAS,

Drs. UJANG HARIADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19630202 199003 1 002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan dan Hibah pada Tahun Anggaran 2018 seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar **Rp.245.817.000,00** yang telah ditargetkan dalam TA 2018 sebesar **Rp.481.000.000,00**.

Realisasi **Belanja Tidak Langsung** (Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS) sebesar **Rp.13.748.270.861,00** atau mencapai **92,59 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp.14.848.663.895,00**. **Belanja Langsung** pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp.13.386.661.541,00** atau mencapai **95,32 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp.14.043.408.200,00**. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar **Rp.27.134.932.402,00** atau **93,92 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp.28.892.072.095,00**, Belanja Modal sebesar **Rp.2.851.379.199,00** atau **79,21 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp.3.599.918.800,00**.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan sebagai berikut:

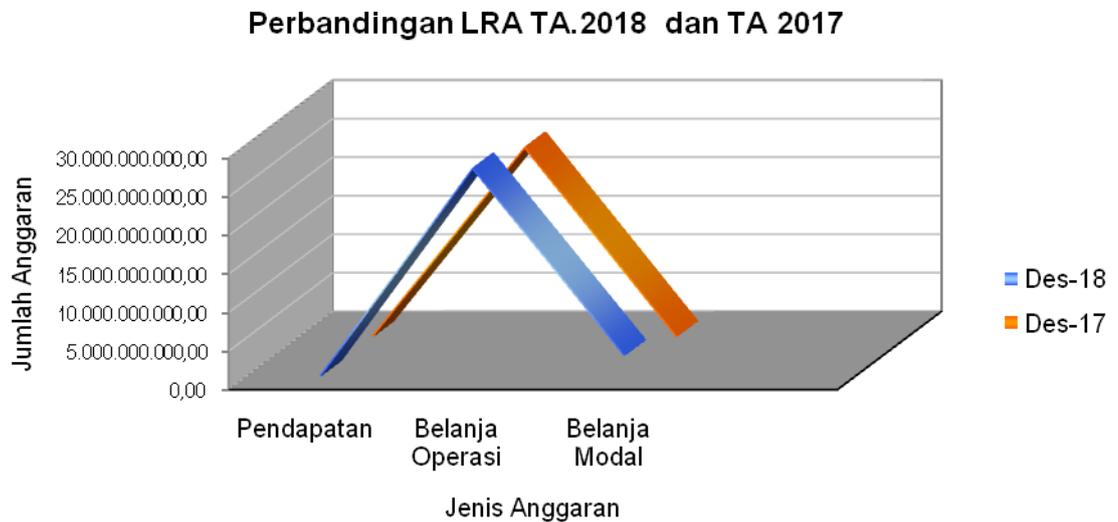
Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

(dalam rupiah)

URAIAN	31-Des-18			31-Des-17		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%	437.000.000,00	279.763.500,00	64,02%
Hasil Retribusi Daerah	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%	437.000.000,00	279.763.500,00	64,02%
Retribusi Jasa Usaha	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%	437.000.000,00	279.763.500,00	64,02%
Penyewaan Tanah dan Bangunan	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%	437.000.000,00	279.763.500,00	64,02%
JUMLAH PENDAPATAN	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%	437.000.000,00	279.763.500,00	64,02%
BELANJA	32.491.990.895,00	29.986.311.601,00	92,29%	27.215.121.488,00	25.006.480.961,00	91,88%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.848.663.895,00	13.748.270.861,00	92,59%	13.259.269.388,00	12.529.444.007,00	94,50%
Belanja Pegawai	14.848.663.895,00	13.748.270.861,00	92,59%	13.259.269.388,00	12.529.444.007,00	94,50%
Belanja Gaji dan Tunjangan	9.533.978.911,00	8.776.340.376,00	92,05%	9.507.769.388,00	9.021.563.455,00	94,89%
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	7.477.272.361,00	7.249.407.700,00	96,95%	7.605.500.000,00	7.249.407.700,00	95,32%
Tunjangan Keluarga	635.280.098,00	587.067.113,00	92,41%	612.950.000,00	587.067.113,00	95,78%
Tunjangan Jabatan	391.314.250,00	300.020.000,00	76,67%	351.113.750,00	300.020.000,00	85,45%
Tunjangan Fungsional	41.596.503,00	3.835.000,00	9,22%	7.500.000,00	3.835.000,00	51,13%
Tunjangan Fungsional Umum	306.084.000,00	288.110.000,00	94,13%	309.339.875,00	288.110.000,00	93,14%
Tunjangan Beras	374.997.166,00	352.902.660,00	94,11%	369.000.000,00	352.902.660,00	95,64%
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	7.112.931,00	3.603.173,00	50,66%	5.022.500,00	3.603.173,00	71,74%
Pembulatan Gaji	136.707,00	100.231,00	73,32%	113.263,00	100.231,00	88,49%
Iuran Asuransi Kesehatan	227.070.330,00	202.546.551,00	89,20%	211.560.000,00	202.546.551,00	95,74%
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	19.041.016,00	14.903.466,00	78,27%	15.990.000,00	14.903.466,00	93,20%
Belanja Jaminan Kematian	26.651.728,00	18.767.561,00	70,42%	19.680.000,00	18.767.561,00	95,36%
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5.314.684.984,00	4.971.930.485,00	93,55%	3.751.500.000,00	3.507.880.552,00	93,51%
Tambahan Penghasilan Berdasar Beban Kerja	5.314.684.984,00	4.971.930.485,00	93,55%	3.751.500.000,00	3.507.880.552,00	93,51%
BELANJA LANGSUNG	17.643.327.000,00	16.238.040.740,00	92,04%	13.955.852.100,00	12.477.036.954,00	89,40%
Belanja Operasi	14.043.408.200,00	13.386.661.541,00	95,32%	12.757.734.100,00	12.250.181.954,00	96,02%
Belanja Pegawai	1.386.660.000,00	1.344.107.000,00	96,93%	1.464.158.000,00	1.391.114.000,00	95,01%
Belanja Barang dan Jasa	12.656.748.200,00	12.042.554.541,00	95,15%	11.293.576.100,00	10.859.067.954,00	96,15%
BELANJA MODAL	3.599.918.800,00	2.851.379.199,00	79,21%	1.198.118.000,00	226.855.000,00	18,93%
Belanja Peralatan dan Mesin	448.200.000,00	388.318.000,00	86,64%	119.450.000,00	109.225.000,00	91,44%
Belanja Bangunan dan Gedung	2.619.268.800,00	1.942.600.699,00	74,17%	959.968.000,00	0,00	0,00%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.000.000,00	29.560.000,00	98,53%	10.000.000,00	9.500.000,00	95,00%
Belanja Aset Tetap Lainnya	502.450.000,00	490.900.500,00	97,70%	108.700.000,00	108.130.000,00	99,48%
JUMLAH BELANJA	32.491.990.895,00	29.986.311.601,00	92,29%	27.215.121.488,00	25.006.480.961,00	91,88%
SURPLUS / (DEFISIT)	32.010.990.895,00	29.740.494.601,00	92,91%	26.778.121.488,00	24.726.717.461,00	92,34%

Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 1
Perbandingan LRA Tahun Anggaran 2018 dan TA.2017



2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp.25.738.813.788,38** yang terdiri dari :

- a. Aset Lancar : Rp. 4.533.000,00
- b. Aset Tetap : Rp.18.406.342.113,81
- c. Aset Lainnya : Rp. 7.327.938.674,57

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp.45.288.711,00** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp.25.693.525.077,38** yang terdiri dari :

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2
Perbandingan Neraca 31 Des 2018 dan 31 Des 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	31-Des-18	31-Des-17	KENAIKAN/PENURUNAN
ASET			
Aset Lancar	4.533.000,00	4.037.400,00	495.600,00
Aset Tetap	18.406.342.113,81	14.570.761.686,70	3.835.580.427,11
Aset Lainnya	7.327.938.674,57	7.327.938.674,57	-
Jumlah Aset	25.738.813.788,38	21.902.737.761,27	3.836.076.027,11
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	45.288.711,00	39.367.865,00	5.920.846,00
Jumlah Kewajiban	45.288.711,00	39.367.865,00	5.920.846,00
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	(40.755.711,00)	(35.330.465,00)	(5.425.246,00)
Ekuitas Dana Investasi	25.734.280.788,38	21.898.700.361,27	3.835.580.427,11
Jumlah Ekuitas Dana	25.693.525.077,38	21.863.369.896,27	3.830.155.181,11
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	25.738.813.788,38	21.902.737.761,27	7.672.152.054,22

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan, dan Belanja serta penyajian Neraca, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KASDA.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

#Ganti halaman ini dengan LRA hasil print aplikasi SIMDA#

NERACA

#Ganti halaman ini dengan Neraca hasil print aplikasi SIMDA#

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

#Ganti halaman ini dengan Neraca hasil print aplikasi SIMDA#

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

#Ganti halaman ini dengan Neraca hasil print aplikasi SIMDA#

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
Per 31 Desember 2018

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Salah satu bentuk upaya nyata untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka mewujudkan *good governance* adalah adanya kewajiban penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum.

Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Permendagri Nomor 13/2006 Pasal 4 ayat (1)). Semangat tersebut harus melekat pada keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban sampai dengan proses evaluasinya.

Menurut PP No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan Laporan Keuangan pemerintah secara spesifik adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2018 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan memberikan informasi keuangan maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai dukungan bagi tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Peraturan Perundang – undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi adalah :

1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 8);

1.3. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD.

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.2. Neraca
 - 5.1.3. Laporan Operasional
 - 5.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis akrual, untuk entitas akuntansi /entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD
- Bab VII Penutup

BAB. II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capainya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

2.2. Kebijakan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti sebagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entita pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya di bandingkan dengan anggaran dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran, termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.

Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Dengan demikian realisasi penggunaan dana harus jelas dan tepat sasaran guna mencapai target atau tujuan yang ingin dicapai.

Realisasi anggaran Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.29.740.494.601,00** atau **92,91.%** yang terealisasi untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam menjalankan program dan kegiatannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi dan diimplementasikan dalam visi dan misi Dinas. Pengelolaan belanja harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan dan memajukan pariwisata serta melestarikan kebudayaan di Provinsi Jambi dan salah satu indikatornya adalah dengan meningkatnya tingkat kunjungan wisatawan di Provinsi Jambi baik wisatawan nusantara maupun manca negara. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Patokan harga Belanja Daerah dan mengacu kepada anggaran yang berbasis kinerja.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi melalui APBD Tahun Anggaran 2018 memperoleh alokasi anggaran belanja daerah (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) sebesar **Rp. 28.892.072.095,00** dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 14.848.663.895,00** yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja Langsung sebesar **Rp 14.043.408.200,00**, merupakan belanja pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat atau publik dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, berupa program dan kegiatan DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi atau mengalami kenaikan

sebesar **Rp. 1.676.950.607,00** atau **0,94 %** jika dibandingkan dengan alokasi APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar **Rp.27.215.121.488,00**. Kenaikan alokasi belanja daerah tersebut disebabkan adanya penambahan alokasi belanja langsung yang cukup signifikan. Dan pemenuhan kebutuhan belanja tidak langsung yang meningkat secara signifikan yang merupakan konsekuensi logis dan bersifat general dengan adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah terkait dengan penambahan jumlah pegawai dan kesejahteraan pegawai.

Alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 17.643.327.000,00** tersebut dapat dirinci untuk Belanja Pegawai **Rp. 1.386.660.000,00**, Belanja Barang dan Jasa **Rp. 12.656.748.200,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 3.599.918.800,00**. Sedangkan terkait dengan belanja langsung, dialokasikan untuk membiayai beberapa urusan, program dan kegiatan yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dari sisi administrasi dan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB. III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2017 melalui APBD Tahun Anggaran 2018 mendapatkan alokasi anggaran Belanja sebesar **Rp 27.215.121.488,00** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp 26.017.003.488,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp 1.198.118.000,00** yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi Belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 25.006.480.961,00** atau sebesar **91,88 %** dengan perbandingan anggaran belanja Tahun Anggaran 2016 dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Perbandingan Belanja Per 31 Des 2018 dan 31 Des 2017

Dalam Rupiah

URAIAN	31-Des-18			31-Des-17		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%	437.000.000,00	279.763.500,00	64,02%
Pendapatan Retribusi Daerah	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%	437.000.000,00	279.763.500,00	64,02%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%	437.000.000,00	279.763.500,00	64,02%
JUMLAH PENDAPATAN	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%	437.000.000,00	279.763.500,00	64,02%
BELANJA	32.491.990.895,00	29.986.311.601,00	92,29%	27.215.121.488,00	25.006.180.961,00	91,88%
BELANJA OPERASI	28.892.072.095,00	27.134.932.402,00	93,92%	26.017.003.488,00	24.779.325.961,00	95,24%
Belanja Pegawai	16.235.323.895,00	15.092.377.861,00	92,96%	14.723.427.388,00	13.920.258.007,00	94,54%
Belanja Barang	12.656.748.200,00	12.042.554.541,00	95,15%	11.293.576.100,00	10.859.067.954,00	96,15%
BELANJA MODAL	3.599.918.800,00	2.851.379.199,00	79,21%	1.198.118.000,00	226.855.000,00	18,93%
Belanja Peralatan dan Mesin	448.200.000,00	388.318.000,00	86,64%	119.450.000,00	109.225.000,00	91,44%
Belanja Bangunan dan Gedung	2.619.268.800,00	1.942.600.699,00	74,17%	959.968.000,00	0,00	0,00%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.000.000,00	29.560.000,00	98,53%	10.000.000,00	9.500.000,00	95,00%
Belanja Aset Tetap Lainnya	502.450.000,00	490.900.500,00	97,70%	108.700.000,00	108.130.000,00	99,48%
JUMLAH BELANJA	32.491.990.895,00	29.986.311.601,00	92,29%	27.215.121.488,00	25.006.180.961,00	91,88%
SURPLUS / (DEFISIT)	32.010.990.895,00	29.740.494.601,00	92,91%	26.778.121.488,00	24.726.417.461,00	92,34%

Berkaitan dengan Belanja Langsung, ada beberapa kegiatan yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2017 realisasi atau serapan anggarannya kurang dari **90 %**. kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dikelola oleh Subbag Umum dan Kepegawaian dari jumlah anggaran sebesar Rp. 591.803.200,00 realisasinya sebesar Rp. 490.749.237,00 atau sebesar 82,92 %
- b. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dikelola oleh Subbag Keuangan dan Aset dari jumlah anggaran sebesar Rp. 73.283.700,00 realisasinya sebesar Rp. 62.541.850,00 atau sebesar 85,34 %
- c. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor yang dikelola oleh Subbag Umum dan Kepegawaian dari jumlah anggaran sebesar Rp. 448.200.000,00 realisasinya sebesar Rp. 388.318.000,00 atau sebesar 86,64 %.
- d. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dikelola oleh Bidang Destinasi dari jumlah anggaran sebesar Rp. 2.802.774.800,00 realisasinya sebesar Rp. 2.126.106.699,00 atau sebesar 75,86 %
- e. Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dikelola oleh Bidang Pengembangan Nilai Budaya dan Seni (PNBS) dari jumlah anggaran sebesar Rp. 666.390.000,00 realisasinya sebesar Rp. 589.169.000,00 atau sebesar 88,41 %
- f. Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Batabase yang dikelola oleh Bidang Destinasi dari jumlah anggaran sebesar Rp. 273.202.000,00 realisasinya sebesar Rp. 244.238.500,00 atau sebesar 89,40 %
- g. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata yang dikelola oleh Bidang Destinasi dari jumlah anggaran sebesar Rp. 296.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 221.792.600,00 atau sebesar 74,93%.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

- a. Penandatanganan dan pengesahan DPA-SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi diterbitkan pada Bulan Februari 2018 hal ini disebabkan oleh adanya Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Non Fisik Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2018 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang kelengkapannya berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) belum dilengkapi dan menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian DPA-SKPD.
- b. Penyerapan anggaran baru dilaksanakan pada Bulan Februari dikarenakan DPA-SKPD baru disyahkan sehingga pengambilan Uang Persediaan (UP), pengisian Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dilaksanakan pada Bulan Februari 2018 sehingga terjadi keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- c. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
- d. Kurang optimalnya koordinasi Bagian – Bagian serta UPTD lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sehingga menghambat pencapaian realisasi program maupun kegiatan.
- e. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Bidang dan UPTD Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

BAB. IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan kebijakan akuntansi menginduk pada kebijakan akuntansi dari entitas pelaporan keuangan daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Jambi.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi adalah Basis Akrual dan berlaku juga untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis akrual untuk pengakuan aktiva, hutang dan ekuitas dalam Neraca.

Basis Akrual untuk Laporan Realisasi Anggaran adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aktiva, hutang dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan dimana pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD.

4.4.1. Pendapatan

Akuntansi pendapatan menggunakan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya. Koreksi atas penerimaan pendapatan (Pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurangan pendapatan.

4.4.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja dengan mekanisme SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah.

Belanja dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, Belanja disajikan berdasarkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi/urusan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

4.4.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan mencakup transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

4.4.4. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari :

- a. ***Kas di Kas Daerah*** merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Jambi yang berada di Rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan. Suatu Investasi disebut setara kas apabila investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- b. ***Kas di Bendahara Penerimaan*** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

- c. **Kas di Bendahara Pengeluaran** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

Kas dinyatakan dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs BI pada tanggal neraca.

4.4.5. Piutang

Piutang merupakan hak yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Piutang / tagihan ke pihak ketiga dinilai sebesar nilai nominal, tidak dibentuk cadangan penghapusan piutang yang tidak tertagih. Piutang / tagihan ke pihak ketiga yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dihapuskan sekaligus pada saat piutang / tagihan ke pihak ketiga dinyatakan tidak dapat ditagih, sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4.6. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Entitas akuntansi yang melakukan pencatatan persediaan dengan tidak menggunakan metode ini harus mendapat persetujuan dari Bupati dan mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan SKPD. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi / opname fisik persediaan. Persediaan dalam Neraca disajikan sebesar :

- a. Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Harga produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

- d. Persediaan yang rusak nilainya ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan persediaan yang sudah tidak ada manfaatnya dinilai sebesar Rp1,00 sampai dengan diterbitkan SK penghapusannya.

4.4.7. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode. Investasi Permanen dibuku berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Bila investasi dalam bentuk saham ditukar dengan aktiva lain, maka nilai saham yang ditukar/dijual ditetapkan harga pokoknya dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata.

4.4.8. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum Untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dinilai dengan **biaya perolehan**. Apabila penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang diatribusikan secara langsung adalah: Biaya persiapan tempat; Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat

(*handling cost*); Biaya pemasangan (*installation cost*); Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan Biaya konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap pakai

Pengeluaran setelah perolehan awal (*Subsequent Expenditures*) suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dengan nilai minimal 2 persen dari nilai suatu asset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

4.4.9. Aktiva Lainnya

Aktiva Lainnya adalah Aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aktiva Lancar, Aktiva Tetap dan Investasi Permanen. Aktiva lainnya terdiri dari :

- 1) **Tagihan penjualan angsuran** adalah tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai dengan nilai nominal dari perjanjian/kontrak. Hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan tagihan penjualan angsuran dilaporkan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain meliputi klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur, klasifikasi menurut jenis aktiva yang dijual;
- 2) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** adalah menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan Perjanjian Kerjasama

atau Nota Kesepahaman. Nilai bangunan yang diperoleh dicatat berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun. Pengungkapan di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, setidaknya disajikan klasifikasi menurut jenisnya;

- 3) **Dana cadangan** adalah dana yang dibentuk guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya dapat membentuk lebih dari satu dana cadangan. Dana cadangan dinilai sebesar akumulasi dana yang berasal dari pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD (nominal) ditambah dengan hasil yang diperolehnya. Hal yang harus diungkapkan meliputi klasifikasi berdasarkan tujuan pembentukannya;
- 4) **Lain-lain Aktiva** adalah aktiva yang tidak dapat dikategorikan dalam tagihan penjualan angsuran, kemitraan dengan pihak ketiga, dan dana cadangan yang antara lain meliputi tagihan kepada para pegawai pemerintah yang terbukti menyalahgunakan keuangan daerah atau pihak ketiga lainnya. Lain-lain Aktiva dinilai sebesar nilai nominalnya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan keuangan disesuaikan kebutuhan daerah yang antara lain meliputi klasifikasi menurut nama pegawai yang bersangkutan (debiturnya).

4.4.10. Hutang

Hutang adalah kewajiban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal laporan keuangan. Hutang antara lain :

- 1) Kewajiban yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat dan daerah otonom lainnya, pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri;
- 2) Kewajiban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang berasal dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Pengakuan hutang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Hutang PFK diakui pada saat SPM diterbitkan dan saat diterimanya PFK lainnya;
- 2) Hutang Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima atau pada saat kewajiban timbul;

- 3) Bagian lancar hutang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi. Hutang dalam valuta asing dikonversikan dalam rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

4.4.11. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah daerah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Pos ekuitas dana terdiri dari:

- 1) **Ekuitas Dana Lancar** merupakan selisih antara asset lancar dengan hutang lancar. Nilai ekuitas dana lancar menunjukkan surplus atau defisit keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam jangka pendek.

Penilaian:

8. Perkiraan SiLPA Tahun Berjalan dan akumulasi SiLPA disajikan sebesar nilai nominal, sedangkan penyajian dalam neraca dan laporan keuangan dilakukan sesuai kebutuhan daerah;
9. Perkiraan cadangan piutang disajikan sebesar saldo piutang jangka pendek yang tercantum di neraca debet;
10. Perkiraan cadangan disajikan sebesar nilai persediaan yang dihitung berdasar harga beli terakhir atau harga standar atau harga estimasi. Untuk pengungkapannya disesuaikan dengan kebutuhan

- 2) **Ekuitas Dana Diinvestasikan** merupakan selisih antara investasi permanen, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk dana yang dicadangkan) dengan hutang jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya. Pencantuman dilaporan keuangan disajikan sebesar nilai yang diinvestasikan.
- 3) **Ekuitas Dana Dicapang** merupakan dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan, untuk tujuan pembiayaan ke depan, biasanya disiapkan guna pelaksanaan proyek yang memerlukan dana relatif besar. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar nilai yang dicadangkan. Sedangkan penyajiannya diungkapkan secara cukup sesuai peruntukan, batasan dan cara penyisihannya;
- 4) **Ekuitas Dana Donasi** merupakan kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi dan merupakan penerimaan hibah, bantuan atau

sumbangan yang diterima dari pihak ketiga. Ekuitas Dana Donasi diakui pada akhir periode sebesar nilai nominal penerimaan hibah, sumbangan maupun swadaya masyarakat.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Selama Tahun Anggaran 2018, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menerima anggaran pengeluaran (Pagu) sebesar **Rp.32.010.990.895,00** yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dan terealisasi (neto) sebesar **Rp.29.740.494.601,00** atau **92,91 %** dari anggaran.

Target pendapatan yang dialokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam TA 2018 sebesar **Rp.481.000.000,00** terealisasi sampai dengan TA 2018 sebesar **Rp.245.817.000,00**.

Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2018 disajikan sebagai berikut

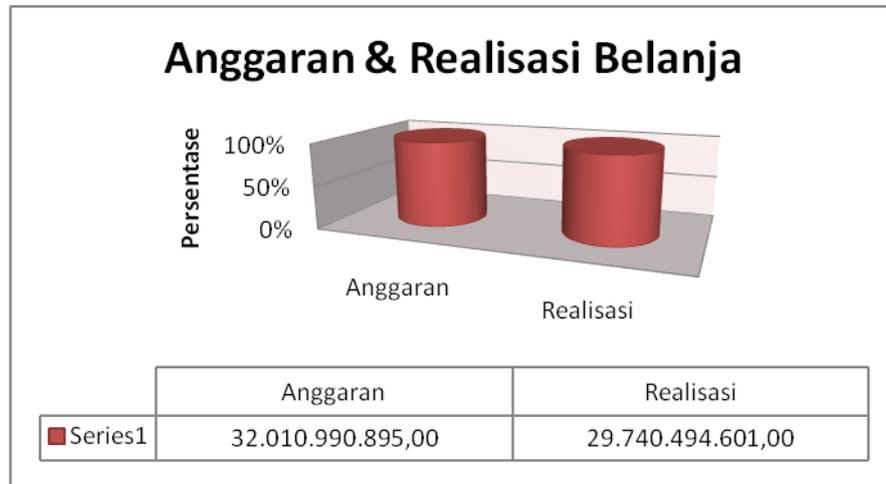
Tabel 4
Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REAL.
			ANGGARAN
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%
Pendapatan Retribusi Daerah	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%
Jumlah Pendapatan	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%
Belanja			
Belanja Operasi	28.892.072.095,00	27.134.932.402,00	93,92%
Belanja Pegawai	16.235.323.895,00	15.092.377.861,00	92,96%
Belanja Barang	12.656.748.200,00	12.042.554.541,00	95,15%
Belanja Modal	3.599.918.800,00	2.851.379.199,00	79,21%
Jumlah Belanja	32.491.990.895,00	29.986.311.601,00	92,29%

Grafik perbandingan anggaran dan realisasi belanja selama Tahun Anggaran 2018 disajikan sebagai berikut :

Grafik 2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018



Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REAL.
			ANGGARAN
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%
Pendapatan Retribusi Daerah	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%
Jumlah Pendapatan	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 245.817.000,00** tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Retribusi Daerah yang merupakan target pendapatan pada UPTD dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi pada tahun anggaran ini dan dibukukan sebagai pendapatan daerah.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 berdasarkan perhitungan bruto sebesar **Rp.29.740.494.601,00** atau **92,91 %** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar **Rp.32.010.990.895,00** . Dibandingkan dengan realisasi belanja bruto Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp.24.726.417.461,00** , terdapat kenaikan sebesar **Rp.5.014.077.140,00**

Realisasi Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 per sumber dana dan jenis belanja dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6
Realisasi Belanja per Sumber Dana Tahun Anggaran 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	31-Des-18			31-Des-17		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	32.491.990.895,00	29.986.311.601,00	92,29%	27.215.121.488,00	25.006.180.961,00	91,88%
Belanja Pegawai	14.848.663.895,00	13.748.270.861,00	92,59%	14.723.427.388,00	12.529.144.007,00	85,10%
Belanja Barang	14.043.408.200,00	13.386.661.541,00	95,32%	11.293.576.100,00	12.250.181.954,00	108,47%
Belanja Modal	3.599.918.800,00	2.851.379.199,00	79,21%	1.198.118.000,00	226.855.000,00	18,93%
Jumlah Belanja	32.491.990.895,00	29.986.311.601,00	92,29%	27.215.121.488,00	25.006.180.961,00	91,88%

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.29.986.311.601,00** merupakan realisasi belanja netto yaitu realisasi belanja setelah dikurangi pengembalian belanja (SSP) atas belanja yang terjadi selama Tahun Anggaran 2018.

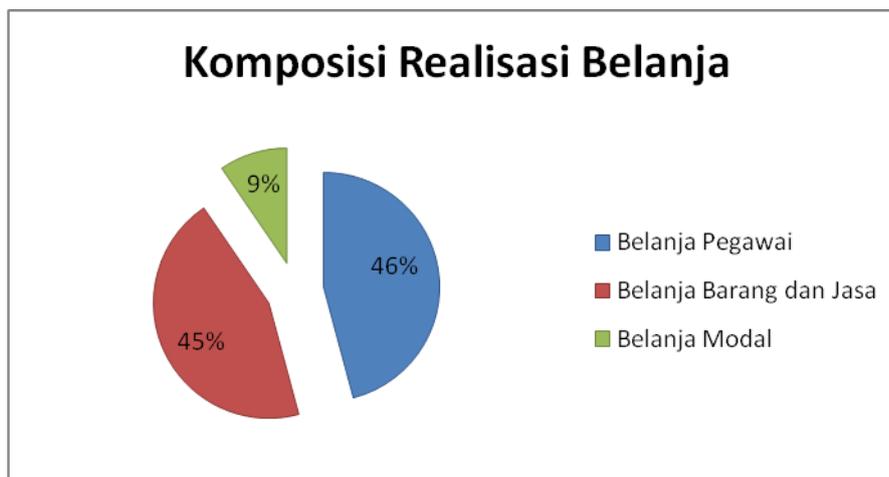
Tabel 7
Pengembalian Belanja (SSP) Tahun Anggaran 2018 per Jenis Belanja

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN BELANJA	REALISASI BELANJA NETO
BELANJA OPERASI	27.345.513.644,00	210.581.242,00	27.134.932.402,00
Belanja Pegawai	13.748.270.861,00	0,00	13.748.270.861,00
Belanja Barang	13.386.661.541,00	0,00	13.386.661.541,00
Belanja Modal	2.851.379.199,00	0,00	2.851.379.199,00
Jumlah Belanja	29.986.311.601,00	210.581.242,00	29.986.311.601,00

Komposisi realisasi belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menurut jenis belanja dapat disajikan seperti grafik dibawah ini:

Gafik 3
Komposisi Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2018



5.1.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp.25.738.813.788,38** yang terdiri dari :

- a. Aset Lancar : **Rp. 4.533.000,00**
- b. Aset Tetap : **Rp.18.406.342.113,81**
- c. Aset Lainnya : **Rp. 7.327.938.674,57**

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp.45.288.711,00** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp.25.693.525.077,38**

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

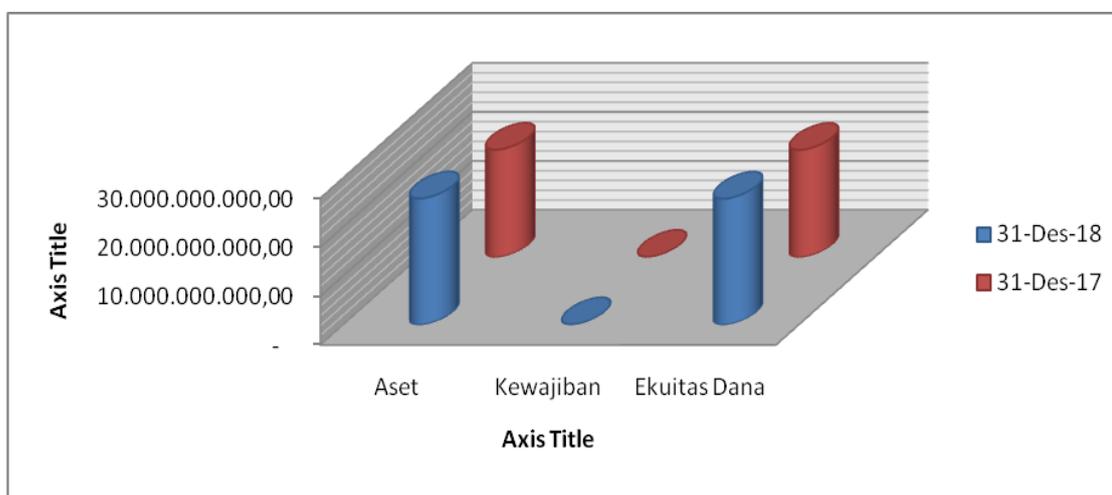
Tabel 8
Perbandingan Neraca 31 Des 2017 dan 31 Des 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	31-Des-18	31-Des-17	KENAIKAN/PENURUNAN
ASET			
Aset Lancar	4.533.000,00	4.037.400,00	495.600,00
Aset Tetap	18.406.342.113,81	14.570.761.686,70	3.835.580.427,11
Aset Lainnya	7.327.938.674,57	7.327.938.674,57	-
Jumlah Aset	25.738.813.788,38	21.902.737.761,27	3.836.076.027,11
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	45.288.711,00	39.367.865,00	5.920.846,00
Jumlah Kewajiban	45.288.711,00	39.367.865,00	5.920.846,00
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	(40.755.711,00)	(35.330.465,00)	(5.425.246,00)
Ekuitas Dana Investasi	25.734.280.788,38	21.898.700.361,27	3.835.580.427,11
Jumlah Ekuitas Dana	25.693.525.077,38	21.863.369.896,27	3.830.155.181,11
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	25.738.813.788,38	21.902.737.761,27	7.672.152.054,22

Komposisi Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4
Grafik Komposisi Neraca



5.1.3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari

suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Ringkasan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 9
Perbandingan Laporan Operasional (LO) 31 Des 2018 dan 31 Des 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN - LO	245.817.000,00	-	245.817.000,00	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	245.817.000,00	-	245.817.000,00	-
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	245.817.000,00	-	245.817.000,00	-
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	-	-	-	-
BEBAN	27.134.932.402,00	-	27.134.932.402,00	-
BEBAN OPERASI	27.134.932.402,00	-	27.134.932.402,00	-
Beban Pegawai - LO	13.748.270.861,00	-	13.748.270.861,00	-
Beban Barang dan Jasa	13.386.661.541,00	-	13.386.661.541,00	-
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-
Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(26.889.115.402,00)	-	(26.889.115.402,00)	-

5.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 10
Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 31 Des 2018 dan 31 Des 2017

URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	(2.863.047.564,73)	0,00
SURPLUS/ DEFISIT-LO	(26.889.115.402,00)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DI KONSOLIDASIKAN	54.466.912.062,00	0,00
EKUITAS AKHIR	24.714.749.095,27	0,00

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

5.2.1. Aset Lancar

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.0,00** . Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Bila dibandingkan dengan saldo kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.0,00** .

Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.0,00** . Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal setoran dari penerimaan retribusi jasa usaha daerah berupa

penyewaan gedung dan tiket masuk pada museum di UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi .

Tabel 11
Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	-

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran didukung Berita Acara Pemeriksaan Kas serta bukti Rekening Koran per 31 Desember 2018 (terlampir).

Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.4.533.000,00** merupakan barang habis pakai untuk operasional kantor termasuk kegiatan berdasarkan penghitungan fisik dan Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat, pada saat pemeriksaan BPK belum diserahkan ke masyarakat. Dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.4.037.400,00** terdapat kenaikan sebesar **Rp.495.600,00** atau **12,28 %** dari tahun yang lalu.

Tabel 12
Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Persediaan	4.533.000,00	4.037.400,00	495.600,00	12,28%
Jumlah Aset Lancar	4.533.000,00	4.037.400,00	495.600,00	12,28%

Daftar persediaan dan Berita Acara Opname persediaan terlampir.

5.2.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.18.406.342.113,81** merupakan saldo aset tetap milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Dibandingkan dengan periode sebelumnya yang merupakan saldo awal per 31 Desember 2017 sebesar

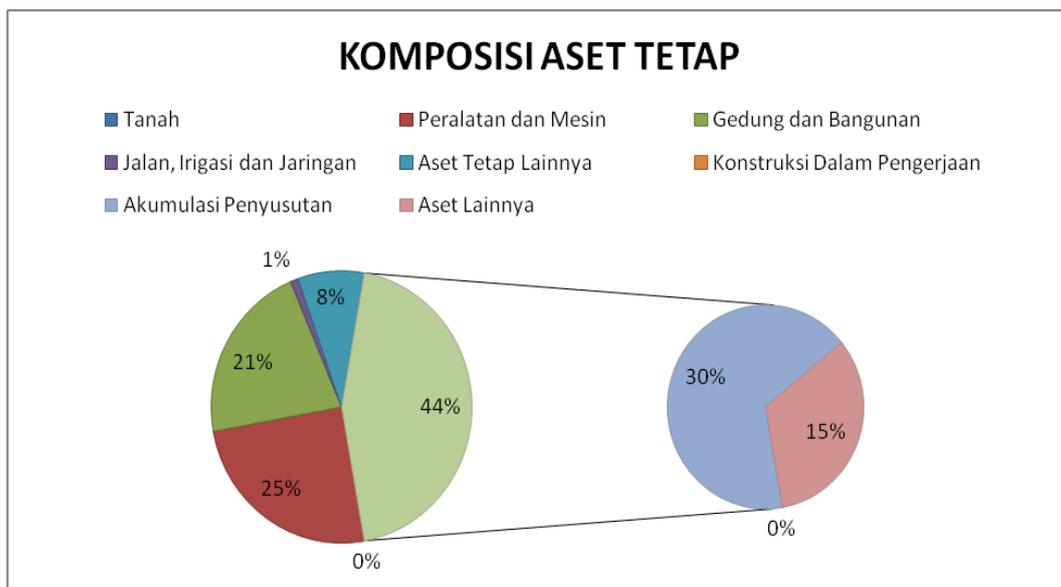
Rp.14.570.761.686,70 terdapat kenaikan sebesar Rp.3.835.580.427,11 atau 26,32 % dari Tahun Anggaran Yang Lalu.

Tabel 13
Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	13.988.655.837,43	12.420.098.337,43	1.568.557.500,00	12,63
Gedung dan Bangunan	14.158.323.725,00	10.718.223.026,00	3.440.100.699,00	32,10
Jalan, Irigasi dan Jaringan	504.509.368,00	474.949.368 ,00	29.560.000,00	6,22
Aset Tetap Lainnya	4.584.725.028,00	4.093.824.528,00	490.900.500,00	11,99
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(14.829.871.844,62)	(13.136.333.572,73)	(1.693.538.271,89)	12,89
Jumlah Aset Tetap dan Aset Lainnya	18.406.342.113,81	14.570.761.686,70	3.835.580.427,11	26,32

Grafik 5
Komposisi Aset Tetap per 31 Des 2018 dan 31 Des 2017



Tabel 14
Perbandingan Aset pada Neraca dan Aset Tetap Dlm Buku Inventarisasi Aset
per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	ASET DALAM NERACA	ASET DALAM SIMAK-BMN	SELISIH
Aset Lancar	4.533.000,00	4.533.000,00	-
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	13.988.655.837,43	13.988.655.837,43	-
Gedung dan Bangunan	14.158.323.725,00	14.158.323.725,00	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	504.509.368,00	504.509.368,00	-
Aset Tetap Lainnya	4.584.725.028,00	4.584.725.028,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(14.829.871.844,62)	(14.829.871.844,62)	-
Aset Lainnya	7.327.938.674,57	7.327.938.674,57	-
Jumlah Aset	25.738.813.788,38	25.738.813.788,38	-

Kondisi Barang Milik Daerah

Saldo Aset sebesar **Rp.25.738.813.788,38** diklasifikasikan sebagaimana Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan kondisi BMD sebagai berikut :

- 1) Kondisi Baik (B) : **Rp. 25.738.813.788,38**
- 2) Kondisi Rusak Ringan (RR) : **Rp. 0,00**
- 3) Kondisi Rusak Berat (RB) : **Rp. 0,00**

Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.13.988.655.837,43** . Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.12.420.098.337,43** terdapat kenaikan sebesar **Rp.1.568.557.500,00** atau **12,63 %** dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 15
Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Peralatan dan Mesin	13.988.655.837,43	12.420.098.337,43	1.568.557.500,00	12,63%
Jumlah	13.988.655.837,43	12.420.098.337,43	1.568.557.500,00	12,63%

Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.14.158.323.725,00** . Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.10.718.223.026,00** tidak terdapat kenaikan sebesar **Rp.3.440.100.699,00** atau **32,10 %** sama dengan Tahun yang lalu, dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 16
Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Gedung dan Bangunan	14.158.323.725,00	10.718.223.026,00	3.440.100.699,00	32,10%
Jumlah	14.158.323.725,00	10.718.223.026,00	3.440.100.699,00	32,10%

Jalan, Jaringan dan Instalasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Instalasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.504.509.368,00** . Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.474.949.368,00** terdapat kenaikan sebesar **Rp.29.560.000,00** atau **6,22 %** dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 17
Jalan, Jaringan dan Instalasi

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Jalan, Jaringan dan Instalasi	504.509.368,00	474.949.368,00	29.560.000,00	6,22%
Jumlah	504.509.368,00	474.949.368,00	29.560.000,00	6,22%

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.4.584.725.028,00** . Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.4.093.824.528,00** terdapat kenaikan sebesar **Rp.490.900.500,00** atau **11,99 %** dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 18
Asep Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Aset Tetap Lainnya	4.584.725.028,00	4.093.824.528,00	490.900.500,00	11,99%
Jumlah	4.584.725.028,00	4.093.824.528,00	490.900.500,00	11,99%

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 0,00** . Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2016 sebesar **Rp. 212.732.000,00** tidak terdapat penurunan dari Tahun Yang lalu.,dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 19
Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.(14.829.871.844,62)** . Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.(13.136.333.572,73)** terdapat penurunan sebesar **Rp.(1.693.538.271,89)** atau **12,89 %** dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 20
Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Akumulasi Penyusutan	(14.829.871.844,62)	(13.136.333.572,73)	(1.693.538.271,89)	12,89%
Jumlah	(14.829.871.844,62)	(13.136.333.572,73)	(1.693.538.271,89)	12,89%

Ekuitas Dana Lancar

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. (40.755.711,00)** merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar/jangka pendek, yang terdiri atas :

- SILPA : Rp. 0,00
- Cadangan Piutang : Rp. 0,00
- Cadangan untuk Persediaan : Rp. 4.533.000,00
- Dana yg hrs disediakan : Rp. (45.288.711,00)
Untuk pembayaran utang

Ekuitas Dana Investasi

Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 25.693.525.077,38** terdiri dari:

- Diinvestasikan dalam Aset Tetap : Rp.18.406.342.113,81
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya : Rp. 7.327.938.674,57

BAB. VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok: “Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan dan pariwisata”.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mendukung dan menjalankan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mempunyai 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu (1) Museum Siginjei, (2) Museum Perjuangan Rakyat Jambi, dan (3) Taman Budaya Jambi.

Berikut tugas dan fungsi dari pemangku jabatan dalam struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi seperti yang diatur dalam PERDA Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, sebagai berikut :

i. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

Tugas:

- a. Membantu Gubernur dibidang tugasnya
- b. Memimpin segala kegiatan dinas

- c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan kepada Gubernur baik baik diminta atau tidak sehubungan dengan langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil
- d. Melaksanakan perintah dan atau Instruksi Gubernur
- e. Mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan dinas lain untuk kelancaran tugas dinas
- f. Melaporkan segala kegiatan kepada Gubernur
- g. Membina Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD)

ii. Sekretariat

Tugas:

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mempunyai tugas Memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, menganalisa dan mengarahkan dalam melakukan urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program

Fungsi:

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta laporan
- b. Melakukan urusan rumah tangga, protokol dan surat menyurat
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan penyusunan program

iii. Bidang Pengembangan Nilai Budaya dan Seni

Tugas :

Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta menyelenggarakan pengembangan di bidang nilai budaya dan seni.

Fungsi:

- a. Menyiapkan analisa rencana pengembangan dan penyelenggaraan nilai budaya dan seni
- b. Menyiapkan kebijaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan rencana operasional di bidang nilai budaya dan seni
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan di bidang nilai budaya dan seni

iv. Bidang Sejarah dan Purbakala

Tugas:

Bidang Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas mengelola kebudayaan khususnya bidang sejarah, purbakala, dan permuseuman yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang sejarah dan purbakala berdasarkan data dan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- b. Penyiapan kebijakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan rencana operasional di bidang sejarah dan purbakala.
- c. Penyiapan bahan pembinaan di bidang sejarah dan purbakala.
- d. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan dan penelitian di bidang sejarah dan purbakala.
- e. Pembuatan laporan kegiatan di bidang sdan purbakala sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- f. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
- g. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

v. Bidang Pengembangan Destinasi

Tugas:

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, memfasilitasi, mengkoordinasi, memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan serta pengembangan sumber daya wisata, alam dan budaya.

Fungsi :

- a. Penghimpunan dan pengorganisasian seluruh kegiatan pada bidang pengembangan destinasi pariwisata
- b. Pembuatan rencana dan program kerja tahunan bidang pengembangan destinasi pariwisata
- c. Penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
- d. Penganalisisan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
- e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
- f. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota
- g. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota
- h. Perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
- i. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan produk wisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, standarisasi di seluruh kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. Perencanaan pengembangan perusahaan di bidang pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan destinasi pariwisata
- l. Penyiapan bahan informasi dan perkembangan investasi di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota
- m. Penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pariwisata, pemberdayaan serta objek dan daya tarik wisata kabupaten/ kota

- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan usaha di bidang pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota
- o. Penyampaian informasi, pertimbangan dan saran dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
- p. Pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas
- q. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengembangan destinasi pariwisata
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

vi. Bidang Pemasaran

Tugas:

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan promosi pariwisata, pengembangan pasar dan kerjasama dan hubungan antar lembaga pariwisata

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan kabupaten/kota dan *stakeholder* dan lembaga-lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar;
- b. Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
- c. Penyiapan bahan promosi berbasis media/teknologi informasi dalam rangka menyelenggarakan kegiatan promosi, publikasi, pelayanan informasi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif di bidang pemasaran pariwisata;
- d. Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- e. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata kepada kepala dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

vii. UPTD Museum Siginjei Jambi

Museum Siginjei Jambi adalah museum umum mempunyai tugas melaksanakan sebahagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penyetoran hasilnya, memberikan bimbingan edukatif kultural benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang bersifat lokal dan regional (Provinsi).

Fungsi:

- a. Pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- b. Pengenalan dan menyebarluaskan hasil penelitian benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- c. Melakukan perawatan/pelestarian dan penyajian rekreatif koleksi benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- d. Pelaksanaan perpustakaan dan pendokumentasian ilmiah
- e. Pelaksanaan bimbingan edukatif kultural, penyajian rekreatif dan publikasi museum dan permuseuman
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha

viii. UPTD Museum Perjuangan Rakyat Jambi

Tugas:

Museum Perjuangan Rakyat adalah museum khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan/pelestarian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya, penyajian serta publikasi, bimbingan edukatif kultural benda sejarah perjuangan rakyat Jambi sebelum kemerdekaan RI, Kemerdekaan RI dan masa pengisian kemerdekaan RI, yang bersifat lokal dan regional (provinsi)

Fungsi :

- a. Pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda-benda yang mempunyai nilai sejarah dan perjuangan rakyat Jambi

- b. Pengenalan dan menyebarluaskan hasil penelitian benda-benda yang mempunyai nilai sejarah dan kejuangan rakyat Jambi
- c. Pembimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda kolektif yang mempunyai nilai sejarah dan kejuangan rakyat Jambi
- d. Pelaksanaan perpustakaan dan pendokumentasian ilmiah
- e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha

ix. UPTD Taman Budaya Jambi

Tugas:

Taman Budaya Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kebudayaan dan pariwisata dalam bidang kegiatan pembinaan dan pengembangan seni budaya lokal dan regional di Provinsi Jambi.

Fungsi :

- a. Pelaksana kegiatan laboratoris berupa pengkajian, revitalisasi pengolahan dan eksperimentasi
- b. Pelatihan dan bimbingan
- c. Pelaksana pameran dan pertunjukan seni budaya
- d. Pelaksana festival, lomba dan sayembara seni budaya
- e. Pelaksana ceramah, temu karya, sarasehan, lokakarya, workshop, diskusi seminar dan temu karya.
- f. Pelaksanaan dokumentasi, perpustakaan budaya, informasi seni, promosi dan sosialisasi.
- g. Pelaksana urusan tata usaha dan rumah tangga Taman Budaya.

STRUKTUR ORGANISASI

B. SUMBER DAYA SKPD

Dilihat dari sudut pandang makro, Provinsi Jambi mempunyai aset kepariwisataan berupa keragaman budaya dan kekayaan alam, industri perhotelan dan restoran/rumah makan, dan industri pariwisata lainnya. Tetapi apabila dilihat dari sudut pandang yang lebih spesifik dan fokus terhadap pelaksanaan teknis dinas, sumber daya yang dimiliki dapat diidentifikasi pada tabel berikut ini

Tabel 21
Sumber Daya Disbudpar Provinsi Jambi

No	Sumber Daya	Jenis Aset	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Sumber Daya Aparatur	a. Disbudpar b. Museum Siginjei c. MPRJ d. TBJ	orang	81 38 16 24	
2	Fisik dan bangunan	a. Kantor Dinas b. Gedung Museum Siginjei c. Gedung MPRJ d. Gedung TBJ e. Gedung Olah Seni	gedung	1 4 2 5 1	1.800.000 m ² 3.837.000 m ² 1.365.000 m ²
3	Peralatan dan mesin	Genset	unit	3	
	Alat transportasi	a. Kendaraan R-4 b. Kendaraan R-2 c. Kendaraan R-3 d. Perahu karet	unit	14 40 1 5	
5	Alat studio dan komunikasi	Peralatan Sound system	item	77	
6	Benda bercorak kebudayaan dan sejarah	a. Koleksi Museum Siginjei b. Koleksi MPRJ c. Gentala Arasy	koleksi	3.379 467 54	

Tabel 22
Jumlah PNS Di lingkungan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Jambi berdasarkan Pangkat dan Jenis
Kelamin s.d Tahun 2018

Berdasarkan Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
Pembina Utama Muda	1	1	-
Pembina Tk 1	6	3	3
Pembina	11	7	4
Penata Tk. 1	30	13	17
Penata	16	7	9
Penata Muda Tk 1	41	19	22
Penata Muda	10	5	5
Pengatur Tk 1	8	6	2
Pengatur	6	4	2
Pengatur Muda Tk 1	3	2	1
Pengatur Muda	2	1	1
Juru Muda	-	-	-
Jumlah	134	68	66

Tabel 23
Jumlah PNS Dilingkungan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Pendidikan

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN	
S3	1
S2	11
S1	73
DIII/D IV	12
SMU	37
SMP	-
Jumlah	134

C. KINERJA PELAYANAN SKPD

Dengan mengambil tolok ukur capaian kinerja Disbudpar Provinsi Jambi sampai dengan akhir tahun 2015, maka capaian kinerja yang dapat terukur adalah: (1) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara; (2) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; (3) Jumlah kunjungan museum; (4) Jumlah pertumbuhan usaha pariwisata; (5) Jumlah koleksi museum; dan (6) Jumlah kelompok seni/sanggar, dapat diilustrasikan pada tabel-tabel berikut ini.

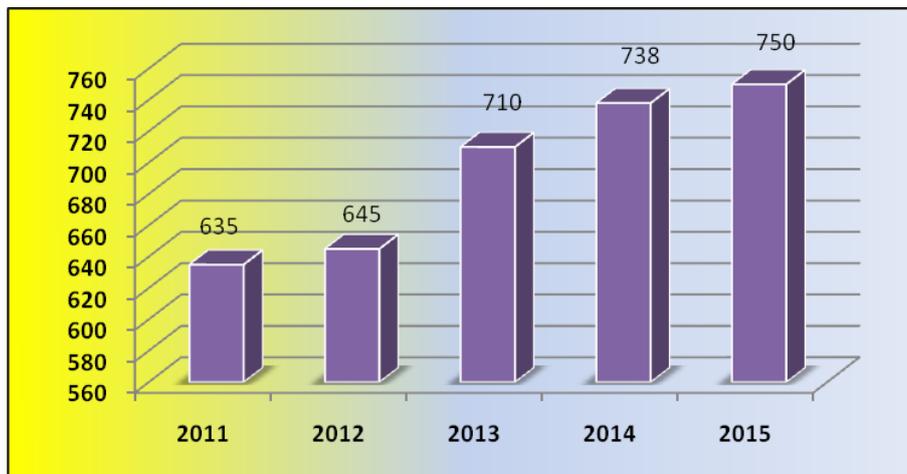
Tabel 24
Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Perkembangan Usaha Pariwisata

No	INDIKATOR	CAPAIAN PADA TAHUN				KETERANGAN
		2013	2014	2015	%	
1	2	4	5	5	6	7
I	WISATAWAN	(orang)	(orang)	(orang)		
a.	Mancanegara	9.919	10.056	10.776		Sumber data:
	Terdiri dari :					
	1. Singapura	1.475	1.475	1.578	6.98	1. Dinas
	2. Malaysia	1.740	1.752	1.805	3.03	Kebudayaan
	3. Thailand	11	11	25	127.27	dan
	4. Philipina	44	44	50	13.64	Pariwisata
	5. Brunei	-	-	-	-	Kabupaten/
	6. China	2.935	2.954	2.998	1.49	Kota se-
	7. Taiwan	1.108	1.128	1.178	4.43	Provinsi
	8. Jepang	881	881	866	1.70	Jambi
	9. India	681	681	690	1.32	
	10. U.S.A	627	630	730	15.87	
	11. Australia	25	28	30	7.14	2. Jumlah hotel
	12. Eropa	249	295	670	127.12	di kabupaten/
	13. Arab Saudi	64	64	-	-	kota se-
	14. Iran	13	13	-	-	Provinsi
	15. Turki	9	9	-	-	Jambi
	16. Denmark	10	36	43	19.44	
	17. Korea	20	20	27	35.00	
	18. Jerman	27	35	86	145.71	
b.	Nusantara	1.434.130	1.520.000	2.447.660	61.03	
II.	H O T E L					
	- Bintang	29	29	25	13.79	
	- Melati	139	139		7.91	
III.	Restoran / Rumah Makan	710	738	150	1.63	
IV.	Biro Perjalanan Wisata	77	77	84	9.09	

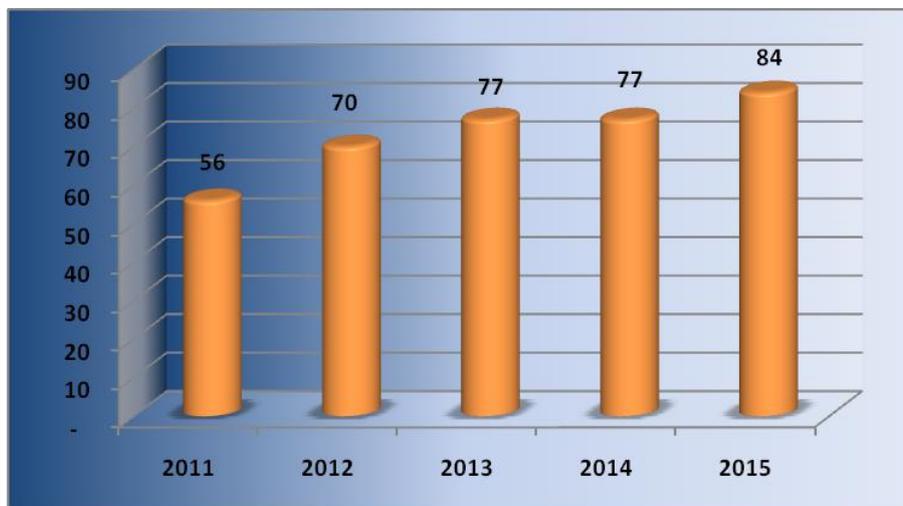
Grafik 6
Tingkat Pertumbuhan Hotel Bintang dan Hotel Melati
di Provinsi Jambi Tahun 2011 - 2015



Grafik 7
Tingkat Pertumbuhan Restoran dan Rumah Makan
di Provinsi Jambi Tahun 2011 - 2015



Grafik 8
Tingkat Pertumbuhan Biro Perjalanan Wisata
di Provinsi Jambi Tahun 2011- 2015



Tabel 25
Data Kunjungan ke Museum dan Jumlah Koleksi

NO	INDIKATOR	Jumlah Koleksi	JUMLAH PENGUNJUNG PER KATEGORI						
			TK/SD	SLTP	SMU	WISMAN	WISNUS	LAIN2	TOTAL
1.	Museum Negeri Siginjei	3.379 buah	12.130	2.246	1.681	43	15.613	1.343	33.029
2.	Museum Perjuangan Rakyat Jambi	467 buah	9.506	1.463	1.512	48	4.657	1.253	18.251

Tabel 26
Data Kelompok Kesenian di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian
1	Kota Jambi	219	2
2	Kabupaten Muaro Jambi	4	-
3	Kabupaten Batanghari	4	-
4	Kabupaten Tebo	6	-
5	Kabupaten Bungo	16	-
6	Kabupaten Kerinci*	34	-
7	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	52	-
8	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	30	-
9	Kabupaten Merangin	25	-
10	Kabupaten Sarolangun	15	-
11	Kota Sungai Penuh*	-	-
Jumlah		405	2

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Provinsi Jambi memiliki keragaman budaya dan kekayaan alam melimpah yang dapat dikembangkan menjadi komoditas/produk pariwisata yang representatif sebagai modal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi. Dalam hal ini perlu adanya kajian berupa *self assesment* terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterbitkan suatu dokumen perencanaan program kegiatan yang mendukung pengembangan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Jambi sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, tugas yang diemban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sebagai induk instansi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Jambi sangatlah vital.

Bahwasanya sektor kebudayaan dan pariwisata pada periode 2016~2021 termasuk ke dalam 5 (lima) besar prioritas pembangunan merupakan langkah yang strategis. Dalam mencapai kondisi dimana pengembangan kebudayaan dan pariwisata menjadi sektor yang diprioritaskan, maka strategi pengembangan pelayanan yang dapat diakomodir oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah

dengan mengukur (1) Kekuatan/*Strength*, (2) Kelemahan/*Weakness*, (3) Peluang/*Opportunities*, dan (4) Ancaman/*Threats* yang kesemuanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 27
Analisa SWOT dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Jambi

Kekuatan <i>Strength</i>	Kelemahan <i>Weakness</i>	Peluang <i>Opportunities</i>	Ancaman <i>Threats</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di tetapkan kerinci sebagai <i>branding</i> pariwisata Jambi ▪ Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN Kerinci dan Candi Muaro Jambi) ▪ Sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) ▪ Di tetapkan Kerinci sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ▪ Geopark Merangin sebagai Geopark Nasional dan dalam Proses menuju Unesco Geopark Global Network ▪ Kekayaan alam dan budaya ▪ Keunikan budaya ▪ Situs-situs yang berkelas dunia ▪ Jambi sebagai tempat yang aman untuk dikunjungi 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek wisata yang tersebar dengan jarak yang jauh - Aksesibilitas menuju objek wisata masih rendah - Promosi yang masih pas-pasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan stakeholder pariwisata - Ekoturisme yang semakin populer - Kelompok budaya Jambi yang masih eksis - Adanya perhatian nasional dan internasional terhadap beberapa objek wisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pemerintah yang masih kontradiktif dengan pengembangan pariwisata - Pengaruh globalisasi yang dapat menggerus nilai luhur budaya yang unik - Deforestasi dan <i>illegal logging</i>

BAB. VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 secara lebih terinci. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan Laporan Keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi ini masih kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dari seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Terima kasih kami tidak lupa disampaikan kepada segenap jajaran pegawai lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

Jambi, Januari 2019

KEPALA DINAS,

Drs. UJANG HARIADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19630202 199003 1 002